



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Lydia Kurniawati Christyana
2. Jabatan : DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
3. NHK : 78173

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/42 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/72 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	295.500.000
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Station Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 82.500.000		
2. MOTOR, Honda sport Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
3. MOBIL, ZIGRA STATION Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
4. MOBIL, DAIHATSU XENIA STATION Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	96.450.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	403.243.337
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.295.193.337
III. HUTANG	Rp.	18.833.356
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.276.359.981

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.